



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Taman Siswa No 1 Padang

<http://www.sumbarprov.go.id> email: perkimpertanahan.sumbar@gmail.com

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2018





KATA PENGANTAR

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, menyusun Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 mengacu kepada:

1. 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat
2. Renstra Dinas Prasarana Jalan, Tata ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
3. Program dan Kegiatan untuk pencapaian target dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat diharapkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian target kinerjanya baik dalam penetapan kebijakan, sasaran dan skala prioritas pembangunan.

Padang, Februari 2016
Kepala Dinas

Ir. CHANDRA MUSTIKA
Pembina Utama Madya (IV/b)
Nip. 19590815 198703 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen tahunan Rencana Kerja (Renja) SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta memuat indikator kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Karena itu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2018 yang mengacu kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi serta berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari Kabupaten/Kota serta masyarakat sebatas tidak melanggar kewenangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja dinas tahun 2018 adalah memberikan arah dan panduan perencanaan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk pelaksanaan tahun anggaran selanjutnya. Serta sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja dinas tahun 2018 adalah :

1. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2018.



2. Menjadi acuan seluruh bidang/unit-unit kerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
3. Menjadi acuan dalam menilai pencapaian kinerja bidang/unit-unit kerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat yang kemudian akan berakumulasi menjadi pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.
4. Menjadi acuan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam mempertanggung-jawabkan akuntabilitas kinerja tahun 2018.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun 2017. Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini sebelumnya berada pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman, yang mengacu kepada APBD tahun berjalan serta mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD

Kinerja program dan kegiatan dievaluasi terhadap aspek fisik maupun keuangan dengan memperhatikan realisasi fisik maupun keuangannya. Hasil evaluasi rata-rata persentase pencapaian kinerja fisik pada tahun anggaran 2016 ini adalah 93,51% sedangkan capaian kinerja keuangan 92,54 %.

Pencapaian Kinerja Fisik Per-Program

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)	Fisik		Kinerja
			Rencana	Realisasi	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.579.321.200	100	96.57	Sangat baik
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.067.112.000	100	91.47	Sangat baik
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	294.149.000	100	100	Sangat baik
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	312.841.000	100	100	Sangat baik
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	1.653.701.206	100	100	Sangat baik
6	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	32.213.403.186	100	99.56	Sangat baik
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	144.425.461.900	100	98.78	Sangat Baik
8	Program Pengembangan Sistem & Pengelolaan Persampahan Regional	5.674.622.800	100	31.70	Kurang Baik
9	Program Pengembangan Perumahan	635.751.000	100	100	Sangat Baik
10	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1.274.483.000	100	100	Sangat baik
11	Program Perencanaan Penataan Ruang	5.991.051.450	100	100	Sangat baik

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)	Fisik		Kinerja
			Rencana	Realisasi	
12	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	195.189.875	100	100	Sangat baik
13	Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	290.000.000	100	100	Sangat baik

Hasil evaluasi capaian kinerja fisik terhadap 13 (tiga belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 12 (dua belas) program yang berkinerja Sangat baik, dan 1 (satu) program yang berkinerja Kurang Baik.

Tabel Pencapaian Kinerja Keuangan Per-Program

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)	Keuangan		Kinerja
			Rencana	Realisasi	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.579.321.200	100	89.65	Sangat baik
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.067.112.000	100	80.84	Sangat baik
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	294.149.000	100	100	Sangat baik
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	312.841.000	100	100	Sangat baik
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	1.653.701.206	100	96.28	Sangat baik
6	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	32.213.403.186	100	83.83	Sangat baik
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	144.425.461.900	100	96.09	Sangat Baik
8	Program Pengembangan Sistem & Pengelolaan Persampahan Regional	5.674.622.800	100	43.94	Kurang Baik
9	Program Pengembangan Perumahan	635.751.000	100	87.26	Sangat Baik
10	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1.274.483.000	100	95.42	Sangat baik
11	Program Perencanaan Penataan Ruang	5.991.051.450	100	98.08	Sangat baik
12	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	195.189.875	100	98.26	Sangat baik
13	Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	290.000.000	100	96.28	Sangat baik

Hasil evaluasi capaian kinerja keuangan terhadap 13 (tiga belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 12 (dua belas) program yang berkinerja Sangat baik, 1 (satu) program yang berkinerja Kurang Baik, hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

Adapun program dan kegiatan yang realisasi fisik atau keuangan program/kegiatan tidak mencapai 100% beserta penyebab rendahnya realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Kendala / Permasalahan pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Permukiman Tahun Anggaran 2016

NO	JENIS PROGRAM/ KEGIATAN	PENYEBAB RENDAHNYA REALISASI
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (88.10 %) Fisik : 100 %	Efisiensi Anggaran
2	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan (64.14 %) Fisik : 100%	Efisiensi Anggaran
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan (65,19 %) Fisik : 100%	Efisiensi Anggaran
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (82,27) Fisik : 100%	Efisiensi Anggaran
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (84,82) Fisik : 100%	Efisiensi Anggaran
6	Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Program Reformasi Birokrasi (55,43) Fisik : 100%	Efisiensi Anggaran
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (55.02 %) Fisik : 55.02 %	Peralatan Repeater Radio antar penduduk sebanyak 5 unit senilai Rp 20 juta tidak terlaksanakan, selebihnya merupakan sisa anggaran
8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi (89.88%) Fisik 100 %	Efisiensi Anggaran
9.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (89.63%) Fisik : 100 %	Efisiensi Anggaran
10.	Peningkatan Infrastruktur TPA Sampah Regional Fisik 0 %	Waktu pelaksanaan tidak mencukupi sebab paket muncul setelah perubahan
11.	Pengendalian dan Pengelolaan UPTD TPA Sampah Regional Fisik : 66.48 %	Pada APBD Perubahan, adanya Revisi alokasi dana untuk BBM menjadi pengadaan Mobil Truk. Namun Paket ini tidak bisa dcairkan

NO	JENIS PROGRAM/ KEGIATAN	PENYEBAB RENDAHNYA REALISASI
12.	Koordinasi dan Pendampingan Bidang Teknis Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP dan AMPL) (29.77%) Fisik : 29.77%	Terlalu banyak Rapat/konsolidasi dilaksanakan di Provinsi sehingga SPPD dalam daerah tidak dicairkan.
13.	Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pendampingan SANIMAS - IDB) Fisik : 20.59%	Tim Monitoring memiliki tingkat kesibukan yang tinggi di masing-masing OPD sehingga pelaksanaan monitoring/pendampingan tidak terlaksana dan belanja perjalanan dinas tidak dicairkan.
14.	Penguatan dan Pembinaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Fisik 74.98%	Peserta tidak mencukupi kuota
15.	Review RTRW Provinsi Sumatera Barat (86.67%) Fisik : 100%	Efisiensi dalam pelaksanaan vakansi
16.	Penyusunan Ranperda SMK3 (13.10%) Fisik : 13.10%	Menunggu Undang-undang Jasa Konstruksi yang baru

Pada tahun 2016, Bidang Pertanahan berada pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana program-program yang dilaksanakan dengan dukungan dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.8.670.548.500,- dan realisasi sebesar Rp.6.201.294.242,- dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

(Lihat Tabel T.VI.C.5)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Untuk pencapaian target indikator kinerja terhadap masing-masing sasaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat diatas didukung oleh beberapa program terkait. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan yang mendukungnya. Terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan-kegiatan.

Evaluasi kinerja merupakan analisa terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja terhadap target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya pada Penetapan Kinerja.

Adapun sasaran Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyediaan Gedung Negara dan Rumah Negara	a. Persentase Peningkatan Pemenuhan Gedung Negara dalam kondisi baik	57,69%
		b. Persentase Pemenuhan Rumah Negara dalam kondisi baik	1,23%
2.	Meningkatnya penyediaan Perumahan dan Permukiman yang berbasis Kawasan Layak Huni	Persentase Perumahan Layak Huni dan Kawasan Permukiman	74,11%
3.	Meningkatkan Keterpaduan Penataan Ruang Wilayah	Persentase Kabupaten / Kota yang Penataan Wilayahnya sesuai dengan Penataan Wilayah RTRW Provinsi	95%

Sasaran Pertama adalah Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Perumahan, Permukiman dan Bangunan Gedung.

Bidang Perumahan dan Permukiman sebelumnya berada pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, untuk tahun 2015 mempunyai Indikator Kinerja yaitu Persentase Peningkatan Pemenuhan Gedung Negara dalam kondisi baik dari target 57,69 % teralisasi menjadi 57,69 % (100 %) target untuk tahun 2015 adalah sebanyak 12 paket kegiatan bangunan gedung dan teralisasinya sebanyak 12 paket kegiatan bangunan gedung. Klasifikasi Penilaian untuk Persentase Peningkatan Pemenuhan Gedung Negara dalam kondisi baik untuk tahun 2015 adalah predikat Sangat Baik.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
-------------------	-------------------	--------	-----------	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya penyediaan Gedung Negara dan Rumah Negara	Persentase Peningkatan Pemenuhan Gedung Negara dalam kondisi baik	57,69	57,69	100,00
	Persentase Pemenuhan Rumah Negara dalam kondisi baik	1,23	1,23	100,00

Indikator Out Come	Indikator Out Put	Target		Realisasi	
		2011 sd 2015	2015	2011 sd 2015	2015
Persentase Pemenuhan Gedung Negara dalam kondisi baik (57%)	a 1 Jumlah bangunan gedung negara yang di bangun (unit)	20	12	20	12
	a 2 Jumlah bangunan gedung negara yang di rehab/retrofit (unit)	7	-	7	-
Persentase Pemenuhan Rumah Negara dalam kondisi baik (95%)	b 1 Jumlah rumah negara yang terbangun (unit)	10	7	6	3
	b 2 Jumlah rumah negara yang di rehab (unit)	4	2	2	2
Persentase Rumah Layak Huni dan Kawasan Permukiman (0,93%)	a 1 Pembangunan Rumah Layak Huni (unit)	3.500	213	3.467	-

A. Meningkatnya Penyediaan Gedung Negara

Adapun Persentase Peningkatan Pemenuhan Gedung Negara dalam kondisi baik dari target 57,69 % teralisasi menjadi 57,69 % (100 %) target untuk tahun 2015 adalah sebanyak 12 paket kegiatan bangunan gedung dan teralisasinya sebanyak 12 paket kegiatan bangunan gedung. Klasifikasi Penilaian untuk Persentase Peningkatan Pemenuhan Gedung Negara dalam kondisi baik untuk tahun 2015 adalah predikat Sangat Baik.

B. Meningkatnya Penyediaan Rumah Negara.

Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2015 mempunyai Indikator Kinerja yaitu Persentase Peningkatan Pemenuhan Persentase Pemenuhan Rumah Negara dalam kondisi baik dari target 1,23 % teralisasi menjadi 1,23 % (100 %) = $4 / 326 \times 100 = 1,23 \%$.

Sasaran ke-2 adalah Meningkatnya Penyediaan Perumahan dan Permukiman yang Berbasis Kawasan Layak Huni

Salah satu sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatnya jumlah perumahan dan permukiman masyarakat. Secara lebih rinci, berikut indikator kinerja, target dan realisasi Sasaran Strategis mengenai Perumahan Layak Huni dan Kawasan Permukiman.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya penyediaan Perumahan dan Permukiman yang berbasis Kawasan Layak Huni	Persentase Perumahan Layak Huni dan Kawasan Permukiman	74,11	74,05	99,91

Adapun Perbandingan Rumah Layak Huni di Provinsi Sumatera dari Tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun	Rumah Layak Huni (Unit Rumah)
2011	752.642
2012	858.544
2013	862.195
2014	913.114
2015	913.114

Dari seluruh total rumah di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1.233.607 unit rumah, terdapat Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 320.000 unit rumah, Rumah Layak Huni sebanyak 913.607 dan terdapat penambahan tahun 2015 sebanyak 630 unit rumah. Dengan bertambahnya Rumah Layak Huni 2015 sebanyak $630 + 913.607 = 914.237$ unit rumah. Adapun persentase Rumah Layak Huni target 2015 adalah 74,11 %

Dengan keluarnya Tanggapan Evaluasi Mendagri Nomor : 903 – 4792 tahun 2015, Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni dibatalkan sebanyak 630 unit rumah, sehingga hanya dihitung tahun 2014 saja sebanyak $913.607/1.233.607 = 74,05$ %. Sehingga, berdasarkan Renstra dari tahun 2011 s/d 2015 sebanyak 3500 unit rumah tidak layak huni, yang teralisasi baru 3.467 unit rumah tidak layak huni = 99,05 %.

Terkait peningkatan penyediaan Rumah dan Kawasan Permukiman yang Berbasis Kawasan Layak Huni, beberapa hal yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut :

1. Prosentase Perumahan Layak Huni dan Kawasan Permukiman Pengurangan rumah tidak layak huni sebanyak 3500 unit dalam jangka waktu 5 tahun (2010 – 2015).
2. Cakupan pelayanan air minum terhadap jumlah penduduk (realisasi 2010 : 55 % , rencana 2015 : 70 %) Penambahan 15 % cakupan pelayanan dilaksanakan dalam rentang waktu 2010-2015.
3. Cakupan pelayanan air limbah terhadap jumlah penduduk Target 78 % cakupan pelayanan air limbah terhadap jumlah penduduk pada akhir 2015 yang sesuai dengan master plan dilaksanakan rentang waktu 2010 – 2015.
4. Porsentase berkurang kawasan genangan air, Target berkurangnya kawasan genangan air sebesar 70 % sesuai dengan master plan dalam rentang waktu 2010 – 2015.
5. Tersedianya pelayanan TPA Regional dan Lokal Target 100 % untuk terpenuhinya pelayanan 2 unit TPA Regional (Kota Payakumbuh dan Kota Solok) serta 9 unit TPA lokal yang tersebar di Kabupaten/Kota.
6. Tersedianya pelayanan pengelolaan sampah skala kawasan (3 R) Target 70 % atau terbangunnya 31 lokasi unit pelayanan pengelolaan sampah skala kawasan (3 R) dalam rentang waktu 2010 – 2015 yang kawasannya tersebar di Kota/Kabupaten sesuai dengan master plan pengolahan sampah di Kota / Kabupaten.

Sasaran ke-3 (tiga) adalah Meningkatnya Keterpaduan Penataan Ruang Wilayah

a) Persentase Tersedianya Perencanaan Tata Ruang dan Perda RTRW

Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2015 mempunyai Indikator Kinerja yaitu Persentase Kabupaten / Kota yang Penataan Wilayahnya sesuai dengan Penataan Wilayah RTRW Provinsidari target 95 % teralisasi menjadi 100 % (105,26 %) target untuk tahun 2015 adalah 1 (satu) Perda RTRW Kabupaten Mentawai dan teralisasinya sebanyak 1 (satu) Peraturan Daerah RTRW.

Klasifikasi Penilaian untuk Persentase Kabupaten / Kota yang Penataan Wilayahnya sesuai dengan Penataan Wilayah RTRW Provinsi untuk tahun 2015 adalah **predikat Sangat Baik**.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Meningkatkan Keterpaduan Penataan Ruang Wilayah	Persentase Kabupaten / Kota yang Penataan Wilayahnya sesuai dengan Penataan Wilayah RTRW Provinsi	95,00	100,00	105,26
---	---	-------	--------	--------

Pencapaian indikator kinerja yang melebihi target ini disebabkan karena terselesaikannya Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7 tahun 2015, sehingga capaian realisasi target 2015 menjadi 105,26 %

b) Prosentase RTR Kawasan Strategis

Kawasan strategis, merupakan kawasan yang diprioritaskan pengembangannya, kawasan strategis ini terdiri atas :

- Kawasan strategis yang didasari oleh penetapan melalui PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),
- Kawasan strategis merupakan hasil perumusan dan kesepakatan Pemerintah Provinsi.

Sedangkan untuk Bidang Pertanahan yang sebelumnya berada pada Biro Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat, juga memiliki Review Pencapaian Kinerja Pelayanan.

Tabel T-IV.C-2

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	SPM																		
	A. Bagian Tata Praja																		
1.	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dan pemerintah Kabupaten / Kota																		
	a) Jumlah rapat koordinasi Gubernur dengan Bupati / Walikota se Sumatera Barat				3	6	6	6	6	3	6	6	6	6	20	40	60	80	100
	b) Jumlah rapat kerja Gubernur dengan Camat se Sumatera Barat				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	40	60	80	100
	c) Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah serta instansi vertikal se Sumatera Barat				8	48	48	48	48	8	48	48	48	48	20	40	60	80	100
	d) Jumlah rapat asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	40	60	80	100
2.	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan Kabupaten / Kota se Sumatera Barat																		
	a) Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan di Kabupaten / Kota se Sumatera Barat				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
	b) Inventarisasi nama rupa bumi				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
	c) Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pertanahan				40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	20	40	60	80	100
3.	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan kebencanaan serta penyakit menular di Kabupaten / Kota se Sumatera Barat																		
	a) Pembinaan keamanan dan ketertiban Kabupaten / Kota se Sumatera Barat				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
	b) Koordinasi pemberantasan penyakit rabies dan penyakit menular lainnya				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
	B. Bagian Otonomi Daerah																		
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi dan kebijakan lingkup tugas pejabat negara Provinsi dan Kabupaten / Kota se Sumatera Barat																		
	a) Jumlah pemrosesan perizinan perjalanan dinas pejabat negara ke luar negeri				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20	40	60	80	100
	b) Jumlah proses pemeriksaan pejabat negara				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	40	60	80	100
	c) Jumlah proses penetapan PAW anggota DPRD Kab/Kota				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	40	60	80	100
	d) Fasilitasi pelaksanaan tugas anggota legislatif Provinsi Sumatera Barat				25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	40	60	80	100
	e) Jumlah buku laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah Provinsi Sumatera Barat akhir tahun anggaran				3/300	3/300	3/300	3/300	3/300	3/300	3/300	3/300	3/300	3/300	20	40	60	80	100
	f) Jumlah buku laporan keterangan pertanggung						3/300	3/300					3/300	3/300				80	100

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	jawaban kepala daerah Provinsi Sumatera Barat akhir masa jabatan																		
	g) Jumlah Camat yang dinilai untuk ditetapkan sebagai Camat berprestasi tingkat Provinsi				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	20	40	60	80	100
	h) Jumlah buku memori serah terima jabatan kepala daerah Provinsi Sumatera Barat				1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	20	40	60	80	100
	i) Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota se Sumatera Barat				1	3	1	14	1	1	3	1	14	1	20	40	60	80	100
2.	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan perbatasan dan kerjasama daerah																		
	a) Jumlah pintu gerbang batas Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Prov. Sumut, Riau, Jambi dan Bengkulu)				2	1	2	3	0	2	1	2	3	0	20	40	60	80	100
	b) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi kerjasama daerah Kabupaten / Kota dalam urusan pemerintahan				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
	c) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten / Kota melalui hubungan kerjasama antar daerah				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
	d) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi penyelesaian permasalahan di Kabupaten / Kota				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
	e) Jumlah patok batas wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Prov. Sumut, Riau, Jambi dan Bengkulu)				200	250	300	350	400	200	250	300	350	400	20	40	60	80	100
3.	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan otonomi daerah																		
	a) Jumlah kecamatan yang ditata				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
	b) Jumlah buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah				60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	20	40	60	80	100
	c) Jumlah buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah akhir masa jabatan				60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	20	40	60	80	100
	d) Pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	20	40	60	80	100
	e) Jumlah kabupaten / kota yang dimonitoring dan dievaluasi dalam peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
	f) Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu (PATEN) di tingkat Kecamatan				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
C.	Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil																		
1.	Meningkatnya penataan pemutasian dan pengawasan kependudukan																		
	a) Jumlah data mutasi dan				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	pengawasan administrasi kependudukan Kabupaten / Kota																		
	b) Pembinaan administrasi kependudukan				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
	c) Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi kependudukan				40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	20	40	60	80	100
	d) Jumlah aparatur pemerintahan terdepan yang dinilai untuk ditetapkan sebagai trbaik tingkat Provinsi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	40	60	80	100
	e) Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi kependudukan				40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	20	40	60	80	100
2.	Meningkatnya penganalisaan dan sistim informasi administrasi kependudukan																		
	a) Data jumlah penduduk kabupaten / kota yang mempunyai KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
	b) Kabupaten / kota yang difasilitasi dalam penerapan pelayanan administrasi kependudukan melalui sistim informasi administrasi kependudukan				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
	c) Jumlah rapat koordinasi penyelenggara administrasi kependudukan				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	20	40	60	80	100
	d) Jumlah aparatur penyelenggara administrasi kependudukan yang mengikuti sosialisasi kebijakan umum administrasi kependudukan				40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	20	40	60	80	100
3.	Meningkatnya tertib administrasi pencatatan sipil																		
	a) Data jumlah anak yang berkaitan dengan kepemilikan akte kelahiran di kabupaten / kota				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
	b) Pembinaan administrasi catatan sipil				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
	c) Jumlah aparatur penyelenggara pencatatan sipil di Kabupaten / Kota yang mengikuti bimbingan teknis catatan sipil				40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	20	40	60	80	100
	d) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pemutakhiran data kelahiran				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
D.	Bagian Pemerintahan Nagari / Kelurahan																		
1.	Meningkatnya penataan dan pengelolaan administrasi dan kelembagaan pemerintahan nagari / desa / kelurahan																		
	a) Jumlah aparatur pemerintahan nagari / desa / kelurahan yang mengikuti bimbingan dan pembinaan administrasi pemerintahan				40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	20	40	60	80	100
	b) Jumlah aparatur pemerintahan nagari / desa / kelurahan yang mengikuti bimbingan dan pembinaan				40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	20	40	60	80	100

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	administrasi keuangan																		
	c) Jumlah nagari / desa / kelurahan yang difasilitasi penyelesaian permasalahan perbatasan dan kerjasama antar nagari				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
	d) Jumlah rapat kerja Gubernur dengan Wali Nagari / Kepala Desa / Lurah				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	40	60	80	100
	e) Jumlah Wali Nagari / Kepala Desa / Lurah dalam yang dinilai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	40	60	80	100
	f) Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi aparatur pembina penyelenggara pemerintahan nagari / desa / kelurahan				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	20	40	60	80	100
2.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan aset dan kekayaan nagari																		
	a) Inventarisasi aset dan kekayaan nagari / desa / kelurahan				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
	b) Jumlah aparatur nagari / desa / kelurahan yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan sumber-sumber pendapatan nagari				40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	20	40	60	80	100
	c) Pembekalan manajemen pemerintahan nagari bagi Wali Nagari				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	20	40	60	80	100
	d) Pembekalan manajemen pemerintahan nagari bagi BPD/Bamus				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	20	40	60	80	100

Sebagai acuan dalam penetapan kawasan strategis telah dikeluarkan kriteria, yang dapat digunakan untuk kepentingan penetapan kawasan strategis provinsi, kecuali kawasan

strategis untuk pertahanan dan keamanan negara karena merupakan kepentingan terbatas. Kawasan strategis lainnya adalah :

1. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi,

Penetapan kawasan strategis provinsi dari sudut pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

- Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- Memiliki potensi ekspor;
- Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; atau
- Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Sedangkan didasari analisa yang bertumpu kepada peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, kawasan strategis diwilayah provinsi Sumatera Barat terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis ITBM (Indarung – Teluk Bayur – Bungus –Mandeh)
- b. Kawasan Industri (KI)
- c. Kawasan Strategis Poros Barat – Timur (Jalur Padang – batas Prov. Riau)
- d. Kawasan Strategis Tapus, Rao dan Mapat Tunggul
- e. Kawasan Strategis Sungai Rumbai
- f. Kawasan Strategis Lunang Silaut
- g. Kawasan Strategis Pangkalan Koto Baru
- h. Kawasan Strategis Kamang Baru
- i. Kawasan Strategis Abai Sangir-Taluak Aie Putih
- j. Kawasan Strategis Silaping

2. Kawasan strategis sosial budaya,

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional;
- Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
- Merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;

- Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional;
- Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional.

Didasari analisa yang bertumpu kepada sosial budaya, kawasan strategis diwilayah provinsi Sumatera Barat adalah Kawasan Strategis Budaya Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya.

3. Kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan ditetapkan dengan kriteria:

- Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem;
- Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air;
- Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup

Didasari analisa yang bertumpu kepada fungsi dan daya dukung lingkungan, kawasan strategis diwilayah provinsi Sumatera Barat terdiri atas :

- a. Kawasan Strategis Ngarai Sianok di Kota Bukittinggi
- b. Kawasan Strategis Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar
- c. Kawasan Strategis Danau Maninjau di Kabupaten Agam
- d. Kawasan Strategis Danau Diatas, Danau Dibawah dan Danau Talang di Kabupaten Solok

4. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan

- a. Kawasan Strategis Ngarai Sianok di Kota Bukittinggi
- b. Kawasan Strategis Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar
- c. Kawasan Strategis Danau Maninjau di Kabupaten Agam
- d. Kawasan Strategis Danau Diatas, Danau Dibawah dan Danau Talang di Kabupaten Solok

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan telaahan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang penyelenggaraan menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut;

Isu-Isu Strategis Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Sumatera Barat

1. Back Log meningkat, dikarenakan Pertumbuhan penduduk , faktor lemahnya ekonomi masyarakat, akibat bencana alam,dll.
2. Ketersediaan Lahan (Land Banking), faktor ketersediaan tanah ini yang menyebabkan tersendatnya perkembangan pembangunan perumahan.
3. Permukiman Kumuh meningkat, dikarenakan faktor lemahnya ekonomi, dan kurangnya 'Sadar Hidup Bersih'.
4. Banjir di permukiman, dikarenakan sudah padatnya permukiman, daya tampung saluran yang ada sekarang sudah tidak memenuhi kapasitas yang ada, sehingga jika curah hujan tinggi mengakibatkan luapan air.
5. Sulitnya perizinan bagi pengembang, dikarenakan faktor ego sektoral.
6. Sulitnya persyaratan dari pihak Bank, dikarenakan pihak Bank memiliki peraturan yang telah ditetapkan, sehingga menyulitkan masyarakat yang tidak punya slip gaji untuk memiliki rumah.
7. Penataan bangunan dan lingkungan masih belum optimal, dikarenakan kurangnya kepedulian akan penataan lingkungan yang layak. Dalam perencanaan rancangan kawasan perlu dipertimbangkan penataan lingkungan yang layak.
8. Ketersediaan Data RTLH yang Valid.
Semua Bidang berperan aktif memberikan data-data yang ada.
Ketersediaan Data secara umum adalah BPS.
Data BPN , mengeluarkan data mengenai status Kepemilikan Lahan.
Data BKKBN ,mengeluarkan data mengenai jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga.
Data di Kecamatan dan Kelurahan, juga mengenai jumlah penduduk per kawasannya.
Dengan adanya data berbagai sumber ini, diharapkan dapat mensinkronkan data dengan adanya kerjasama mengenai pemberian data sehingga dapat mengetahui jumlah penduduk yang lebih akurat dan valid.

Isu-Isu Strategis bidang Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat

1. Isu Strategis Pengembangan Permukiman
 - a. Pengembangan permukiman baru
 - b. Peningkatan kualitas permukiman
 - c. Penanggulangan bencana alam pada kawasan permukiman
 - d. Pembangunan Rusunawa pada kawasan padat penduduk
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana di perdesaan terutama mendukung kawasan agropolitan
 - f. Percepatan pembangunan prasarana dan sarana pada perdesaan tertinggal.
2. Isu Strategis Pembangunan Prasarana, Saran Utilitas Umum Kawasan
 - a. Menurunnya kuantitas dan kuantitas air baku yang dipergunakan dalam sistem pelayanan air minum.

- b. Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan di Provinsi Sumatera Barat.

Isu-Isu Strategis bidang Pengelolaan Sampah Regional di Provinsi Sumatera Barat

Isu Strategis Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)

- a. Drainase
 - Kondisi drainase saat ini beragam antar kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hal ini terkait dengan topografi setempat
 - Drainase perkotaan mempunyai fungsi sebagai sebagai pengatur limpahan air (banjir) .
- b. Persampahan
 - Secara umum pengelolaan sampah dilakukan adalah dengan mengumpulkan sampah rumah kemudian petugas mengumpulkannya dalam *Tempat Penampungan Sementara (TPS)* yang ditempatkan di setiap kelurahan atau RW. Selanjutnya truk sampah mengangkutnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
 - Saat ini sebagian Tempat Pembuangan Akhir masih *open dumping*.
- c. Air Limbah
 - Sistem pengelolaan limbah rumah tangga di Sumatera Barat masih sederhana dengan mengalirkan saluran air limbah rumah tangga ke saluran drainase.
 - Penampungan tinja dilakukan dengan membangun tangki septik pada masing-masing rumah tangga.

Isu-Isu Strategis bidang Pertanian di Provinsi Sumatera Barat

Berkenaan dengan pengelolaan Bidang Pertanian, terdapat isu-isu strategis sebagai berikut:

- ✓ Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah
Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah masih menjadi isu utama, manakala faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi kepastian hukum hak atas tanah belum dapat diperbaiki secara signifikan. Faktor-faktor dimaksud, antara lain adalah rendahnya cakupan peta dasar pertanian, rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat, rendahnya kepastian batas kawasan hutan dan non hutan, rendahnya tingkat penyelesaian kasus pertanian, dan rendahnya penetapan batas tanah adat/ulayat .

Saat ini, bila terjadi sengketa pertanian antara dua pihak atau lebih dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dengan berperkara di pengadilan. Diperoleh fakta ada beberapa jenis pengadilan yang berbeda dengan kemungkinan keputusan pengadilan yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan kepastian hukum masyarakat

terhadap hak atas tanah tidak dapat terjamin bahkan oleh lembaga peradilan yang ada.

- ✓ Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta Kesejahteraan Masyarakat

Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) masih menjadi masalah. Meskipun secara menerus telah diupayakan redistribusi tanah dari berbagai sumber tanah, namun disadari bahwa sumber tanah untuk kegiatan redistribusi hanya tinggal berasal dari tanah terlantar dan pelepasan tanah hutan.

- ✓ Kinerja Pelayanan Pertanahan

Upaya terus menerus yang dilakukan Pemerintah dalam memperbaiki kinerja pelayanan pertanahan, antara lain adalah dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen pertanahan nasional (Simtanas). Sepanjang tahun 2010- 2014 telah dikembangkan aplikasi sistem informasi pertanahan pada seluruh Kantor Wilayah Pertanahan. Namun demikian tetap dirasakan bahwa pelayanan pertanahan belum optimal.

Kemudian, teridentifikasi bahwa kurangnya kinerja pelayanan pertanahan karena masyarakat harus menunggu cukup lama untuk dapat menyelesaikan pelayanan pertanahannya sebagai akibat kurangnya jumlah Juru Ukur Pertanahan.

Kondisi yang demikian menunjukkan adanya proporsi yang tidak seimbang antara juru ukur pertanahan dan non juru ukur sehingga memengaruhi kinerja pelayanan pertanahan menjadi tidak optimal.

- ✓ Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum menjadi permasalahan bidang pertanahan terlihat dari pembebasan tanah yang berlarut-larut dan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. UU No. 2/2012 tentang **Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum**, Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Perpres No. 40/2014 tentang Perubahan Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta perangkat hukum turunannya, memberi kepastian dari sisi waktu pengadaan melalui pembatasan waktu maksimal pengadaan tanah. Namun demikian, peraturan tersebut belum dapat mengantisipasi permasalahan kepastian dari sisi perencanaan dan penganggaran pengadaan tanah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan visi dan misi pembangunan nasional Tahun 2015-2019, yaitu *Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*, maka tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 adalah Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas.

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemahaman ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang layak, dapat diwujudkan dengan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang sinergis dan melingkupi berbagai bidang, yaitu salah satunya adalah bidang perumahan agar mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Hingga saat ini, hampir seluruh daerah di Indonesia belum menempatkan pembangunan perumahan sebagai prioritas pembangunan di daerah masing-masing. Hal ini belum sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa urusan perumahan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan yang wajib (berkaitan dengan pelayanan dasar) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Target Outcome Infrastruktur dalam RPJM 2015 – 2019 terkait Bidang Perumahan

INDIKATOR	Kondisi 2014	Target Akhir 2019
INFRASTRUKTUR DASAR		
Akses Air Minum Layak	68,5 %	100 %
Akses Sanitasi Layak	60,5 %	100 %
Kawasan Kumuh Perkotaan	37.407 Ha	0 Ha
Backlog Kebutuhan Rumah	13,5 Juta	6,8 Juta
KONEKTIVITAS		
Kemantapan Jalan Nasional	94 %	98 %
Waktu Tempuh Rata-rata	2.6 Jam/100 Km	2,2 Jam / 100 Km

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri dasar melalui keterpaduan pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel. (Renstra Kemenpu-Pera Tahun 2015-2019).

Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi:

1. Untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air,
2. Untuk dukungan terhadap **konektivitas nasional** guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan; dan
3. Untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan **kebutuhan air minum** bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan **kebutuhan hunian dan permukiman yang layak**, peningkatan pemenuhan **akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan**

kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara selama RPJMD baru belum terbentuk. Oleh karena itu, penetapan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 memedomani Rencana Strategis Tahun 2010-2015 yaitu :

1. Terpenuhinya infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.
2. Terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Kewenangan Provinsi terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana.
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemda provinsi.
3. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha.
4. Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- Pencapaian MDGs.
- Pengentasan kemiskinan.
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
- Pengembangan daerah terisolir.

Pada Bidang Pertanahan, ada berupa usulan Rencana program dan kegiatan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME
	URUSAN PERTANAHAN			
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN	Sumbar	Terwujudnya Pengelolaan Pertanahan Di Sumbar	
	Penanganan Masalah Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	Sumbar	Terwujudnya penyelesaian masalah pertanahan di Prov. Sumbar	80 %
	Monev Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Sumbar	Terlaksananya Monev pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan UU. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Sumbar No 171-115-2014	19 Kab/Kota

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Setelah Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2018 dibuat, maka perlu dipersiapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2018 yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

TABEL T.VI.C.10
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA BARAT

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU DANA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL					49,981,274,550	
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					49,981,274,550	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,792,000,000	
1 01 1 01 04 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sumatera Barat	12 Bulan	12,000,000	APBD
1 01 1 01 04 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana untuk layanan jasa komunikasi (Telpon), Air & Listrik	Sumatera Barat	12 Bulan	100,000,000	APBD
1 01 1 01 04 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	Tersedianya jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	Sumatera Barat	10 Orang Jasa Kebersihan, 6 Orang Jasa Pengamanan Kantor dan 7 Orang Sopir	855,000,000	APBD
1 01 1 01 04 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Sumatera Barat	12 Bulan	100,000,000	APBD
1 01 1 01 04 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan/foto copy yang diperlukan	Sumatera Barat	12 Bulan	100,000,000	APBD
1 01 1 01 04 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sumatera Barat	12 Bulan	25,000,000	APBD
1 01 1 01 04 01 01 14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	Sumatera Barat	3 Koran Warta Perundangan, 3 Koran Nasional, 2 Koran Lokal dan 2 Tabloid Lokal	25,000,000	APBD
1 01 1 01 04 01 01 17	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ke Dalam dan Luar Daerah	Sumatera Barat dan Luar Sumatera Barat	1 Tahun	500,000,000	APBD
1 01 1 01 04 01 01 18	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Terlaksananya Kegiatan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Sumatera Barat	18 Publikasi	75,000,000	APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					2,740,000,000	
1 01 1 01 04 01 02 11	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Sumatera Barat	10 Unit PC, 10 Unit Notebook, 10 Unit Pinter, 2 Unit Penghancur Kertas dan 10 Buah Lemari Arsip	610,000,000	APBD
	- AIO PC		Sumatera Barat			
	- Notebook		Sumatera Barat			
	- Printer		Sumatera Barat			
	- Lemari Arsip		Sumatera Barat			
1 01 1 01 04 01 02 19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Sumatera Barat	8 Kendaraan Roda 4	250,000,000	APBD
1 01 1 01 04 01 02 23	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Barat	Operasional	100,000,000	APBD
1 01 1 01 04 01 02 43	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Terlaksananya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Sumatera Barat	20 Unit Komputer, 15 Unit Notebook dan 15 Printer	100,000,000	APBD
1 01 1 01 04 01 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Sumatera Barat	4 Unit Kendaraan Roda 4	1,480,000,000	APBD
1 01 1 01 04 01 02	Pengadaan Meubelier	Tersedianya Meubelier guna menunjang kelancaran Aktivitas Kantor	Sumatera Barat	10 Buah Meja Rapat dan 10 Buah Kursi Rapat	200,000,000	APBD

KODE							URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018					
									LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		
1	01	1	01	04	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur			200,000,000			
	1	01	1	01	04	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian Karyawan PNS Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sumatera Barat	250 Orang	200,000,000	APBD
1	01	1	01	04	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya Peningkatan SDM Aparatur			200,000,000			
	1	01	1	01	04	01	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan	Sumatera Barat	12 Orang Pelatihan Luar Daerah & 9 Orang Pelatihan Dalam Daerah	200,000,000	APBD
1	01	1	01	04	01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan			281,274,550			
	1	01	1	01	04	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD (LAKIP, LKPJ dan LPPD)	Sumatera Barat	3 Laporan	50,000,000	APBD
	1	01	1	01	04	01	06	04	Penatausahaan Keuangan OPD	Terlaksananya Kelancaran Penatausahaan Keuangan OPD	Sumatera Barat	12 Bulan	231,274,550	APBD
1	01	1	01	04	01	07	Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan			550,000,000			
	1	01	1	01	04	01	07	01	Penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD	Tersusunnya RKA dan DPA OPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sumatera Barat	3 Dokumen	200,000,000	APBD
	1	01	1	01	04	01	07	02	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan OPD	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Program Tahunan OPD secara Terpadu	Sumatera Barat	Monev Kinerja	200,000,000	APBD
	1	01	1	01	04	01	07	03	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPD	Tersedianya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang OPD, serta tunjuk aset yang telah dihibahkan ke Kabupaten/Kota	Sumatera Barat	12 Bulan	150,000,000	APBD
1	01	04	1	01	04	01	10	Program Pengembangan Perumahan				3,700,000,000		
	1	01	04	1	01	04	01	10	Fasilitasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	Terlaksananya penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi	Sumatera Barat			APBD
	1	01	04	1	01	04	01	10	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Yang Terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi	Sumatera Barat			APBD
	1	01	04	1	01	04	01	10	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi MBR di Kawasan Kumuh	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di 19 Kabupaten/Kota	Sumatera Barat			APBD
	1	01	04	1	01	04	01	10	Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Provinsi Sumatera Barat		100%	500,000,000	APBD
	1	01	04	1	01	04	01	10	Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya penyusunan Perda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat		100%	400,000,000	APBD
	1	01	04	1	01	04	01	10	Penyusunan NSPK Pengembangan Perumahan	Tersusunnya Norma Standar Pedoman Kriteria Pengembangan Perumahan di Provinsi Sumatera Barat		100%	300,000,000	APBD
	1	01	04	1	01	04	01	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan		100%	200,000,000	APBD
	1	01	04	1	01	04	01	10	Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Sosialisasi Penguatan dan Pembinaan kepada POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat		100%	200,000,000	APBD
	1	01	04	1	01	04	01	10	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)		100%	200,000,000	APBD
	1	01	04	1	01	04	01	10	Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam	Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam		100%	400,000,000	APBD
	1	01	04	1	01	04	01	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat di Sumatera Barat		100%	200,000,000	APBD
	1	01	04	1	01	04	01	10	Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat	Tersusun dan terupdate Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Sumatera Barat	5 Lokasi	100%	1,000,000,000	APBD
	1	01	04	1	01	04	01	10	Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Sumatera Barat		100%	300,000,000	APBD
1	01	04	1	01	04	01	11	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				5,900,000,000		
	1	01	04	1	01	04	01	11	Pengendalian dan operasional UPTD TPA Sampah Regional	Terlaksananya operasional TPA	Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kab. Solok	20	4,500,000,000	APBD
	1	01	04	1	01	04	01	11	Peningkatan pembangunan Infrastruktur TPA Regional	Tersedianya infrastruktur di TPA Sampah Regional	Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kab. Solok	2	1,200,000,000	APBD

KODE								URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			
										LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU DANA	SUMBER DANA
1	01	04	1	01	04	01	11	Pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional	Jumlah lokasi kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dipantau	Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kab. Solok	2	200,000,000	APBD
1	01	04	1	01	04	01	12	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan				32,590,000,000	
1	01	04	1	01	04	01	12	Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi	Terlaksananya PLP2K-BK	Dharmasraya, Pessel, Solse, Sijunjung	4 Kawasan	13,800,000,000	APBD
1	01	04	1	01	04	01	12	Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota	4 Dokumen	2,300,000,000	APBD
1	01	04	1	01	04	01	12	Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum pada Kawasan Strategis dan Khusus	Dharmasraya (2 Lok), Padang	3 Kawasan	13,000,000,000	APBD
1	01	04	1	01	04	01	12	Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Strategis dan Khusus	Terlaksananya Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum pada Kawasan Strategis dan Khusus	Dharmasraya, Sijunjung, Padang, Kota Solok, Pessel, Agam	6 Dokumen	3,000,000,000	APBD
1	01	04	1	01	04	01	12	Penyusunan Ranperda Persampahan Provinsi Sumatera Barat	Jumlah perda yang diterbitkan	Sumatera Barat	1 Dokumen Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Persampahan	250,000,000	APBD
1	01	04	1	01	04	01	12	Sosialisasi persampahan terhadap Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang telah diberikan sosialisasi persampahan	Sumatera Barat	19	240,000,000	APBD
1	01	04	1	01	04	01	13	Program Pengelolaan Pertanahan				2,028,000,000	
1	01	04	1	01	04	01	13	Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	Jalan Tol, KEK Mandeh, Terowongan Sianok	1 Dokumen	225,000,000	APBD
1	01	04	1	01	04	01	13	Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Padang	1 Kali Kegiatan	163,000,000	APBD
1	01	04	1	01	04	01	13	Bimtek Pengelolaan Pertanahan	Terlaksananya Bimtek Perencanaan Penatagunaan Tanah, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Penanganan Masalah tanah dan Sosialisasi Pengaturan dan Penetapan Tanah Ulayat	Padang	4 Kali Kegiatan	570,000,000	APBD
1	01	04	1	01	04	01	13	Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan	Terlaksananya Penanganan Masalah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Tersedianya data penyelesaian masalah tanah ulayat dan Tersedianya data Penyelesaian masalah Tanah Kosong, Tanah Terlantar, Tanah Kosong, Redistribusi Tanah, Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	19 Kab/Kota	3 Dokumen	553,000,000	APBD
1	01	04	1	01	04	01	13	Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Padang	1 Kali Kegiatan	169,000,000	APBD
1	01	04	1	01	04	01	13	Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat	Terlaksananya Penanganan Masalah sengketa dan konflik Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	19 Kab/Kota	85%	183,000,000	APBD
1	01	04	1	01	04	01	13	Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	19 Kab/Kota	1 Dokumen	165,000,000	APBD

CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
8	8	9
		113,023,000,000
		113,023,000,000
		2,090,000,000
	12 Bulan	14,000,000
	12 Bulan	115,000,000
	10 Orang Jasa Kebersihan, 6 Orang Jasa Pengamanan Kantor dan 7 Orang Sopir	983,000,000
	12 Bulan	115,000,000
	12 Bulan	115,000,000
	12 Bulan	58,000,000
	3 Koran Warta Perundangan, 3 Koran Nasional, 2 Koran Lokal dan 2 Tabloid Lokal	29,000,000
	1 Tahun	575,000,000
	18 Publikasi	86,000,000
		2,271,000,000
	10 Unit PC, 10 Unit Notebook, 10 Unit Pinter, 2 Unit Penghancur Kertas dan 10 Buah Lemari Arsip	702,000,000
	7 Kendaraan Roda 4	288,000,000
	100%	115,000,000
	100%	115,000,000
	2 Unit Kendaraan Roda 4	851,000,000
	100%	200,000,000

CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
		230,000,000
	250 Orang	230,000,000
		230,000,000
	8 Orang Pelatihan Luar Daerah & 8 Orang Pelatihan Dalam Daerah	230,000,000
		460,000,000
	3 Laporan	115,000,000
	12 Bulan	345,000,000
		633,000,000
	3 Dokumen	230,000,000
	Monev Kinerja	230,000,000
	12 Bulan	173,000,000
		51,568,000,000
	25%	25,960,000,000
	25%	7,308,000,000
	100%	15,000,000,000
	100%	500,000,000
	100%	300,000,000
	100%	250,000,000
	100%	250,000,000
	100%	250,000,000
	100%	400,000,000
	100%	250,000,000
	100%	1,100,000,000
		7,470,000,000
	25	6,000,000,000
	2	1,250,000,000

CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	2	220,000,000
		45,860,000,000
	4 Kawasan	13,800,000,000
	4 Dokumen	2,300,000,000
	6 Kawasan	26,000,000,000
	6 Dokumen	3,000,000,000
	1 Dokumen Perda Provinsi Sumatera Barat tentang Persampahan	500,000,000
	19	260,000,000
		2,211,000,000
	1 Dokumen	225,000,000
	1 Kali Kegiatan	180,000,000
	1 Kali Kegiatan	634,000,000
	3 Dokumen	614,000,000
	1 Kali Kegiatan	186,000,000
	85%	185,000,000
	1 Dokumen	187,000,000